PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GATOT SULAEMAN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **155047**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 775.878.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
3. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 257.880.000
4. Tanah Seluas 975 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 79.950.000
5. Tanah Seluas 1532 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 98.048.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 460.500.000

1. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1992, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 294.000.000
3. MOTOR, HONDA ADV 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

4. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
5. MOBIL, NISSAN MARCH Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
6. MOTOR, YAMAHA SKUTIK/GRAND FILANO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 26.500.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**130.324.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**12.000.000**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**32.966.357**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**1.411.668.357**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**45.448.927**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**1.366.219.430**

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.